

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Budi Santoso, Urip, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenamedia Group, Jakarta.
- Ibrahim Kosasi, Johanes, 2019, *Kausa Yang Halal Dan Kedudukan Bahasa Indonesia Dalam Hukum Perjanjian*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ichsan, Nursyansi, dan Ramli, Muh, 2022, *Hukum Perjanjian dan Bisnis*, Azka Pustaka, Sumatera Barat.
- Hadrian, Endang, dan Hakim, Lukman, 2020, *Hukum Acara Perdata di Indonesia Permasalahan Eksekusi dan Mediasi*, Deepublish, Yogyakarta.
- Hehanussa, Deassy J. A, dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum*, Widina Media Utama, Bandung.
- Huberman, dan Miles, 1992, *Analisis Data Kualitatif*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Margono, 2019, *Asas Keadilan, Kemanfaatan, dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*” Sinar Grafika. Jakarta.
- Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram.
- Pamungkasih, Rini, 2009, *101 Draf Surat Perjanjian (Kontrak)*, Trans Media Pustaka, Jagakarsa.
- Permadi, Iwan, 2014, *Hak Atas Tanah Bagi Warga Negara Asing*, Gunung Samudera, Malang.
- Ramadhani, Rahmat, 2024, *Buku Ajar Hukum Pertanahan*, Umsu Press, Medan.
- Rahman, Suffirman dan Abbas, Ilham, 2023 *Hukum Dalam Jual Beli Tanah*, Sefa Media Utama, Aceh.
- Rahim, A, 2022, *Dasar-Dasar Hukum Perjanjian Perspektif Teori Dan Praktik*, Humanities Genius, Makassar.
- Salim, 2019, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2017, *Hukum Agraria, Kajian Komprehensif*, Kencana, Jakarta.
- Sigit Pramukti, Angger dan Widayanto, Erdha, 2015, *Awas Jangan Beli Tanah Sengketa*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.

- Sriwidodo, Joko dan Kristiawanto, 2021, *Memahami Hukum Perikatan*, Kepel Press, Yogyakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2011, *Teori Hukum*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S. W, 2005, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2007, *Peralihan Hak Atas Tanah Dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sutedi, Adrian, 2011, *Sertipikat Hak Atas Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Syahputra, Akmaluddin, 2012, *Hukum Perdata Indonesia*, Citapustaka Media Perintis, (2012), Medan.
- Syahrani, Riduan, 1998, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- Syarief, Elza, 2014, *Persertifikatan Tanah Bekas Hak Eigendom*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta
- Topo Santoso, 2020, *Nominee Arrangement Dalam Perspektif Kriminalisasi Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Islam, Notaris, dan Asas Nasionalitas.*, Zahir Publishing, Yogyakarta.

B. JURNAL

- Aisyah Dinda Karina, dan Muhammad Zainuddin, Penggunaan Metode Yuridis Normatif Dalam Membuktikan Kebenaran Pada Penelitian Hukum, *Smart Law Jurnal*, Vol. 2, No. 2, 2023.
- Andina Damayanti Saputri, Perjanjian *Nominee* Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor: 12/Pdt/2014/PT Dps), *Jurnal Repetorium*, Vol. II, No. 2, 2015.
- Bambang Sudiarto, Subjek Hak Milik Atas Tanah Menurut UUPA, *Jurnal Al-Qisth Law Review*, Vol. 5, No. 1, 2021.
- Johan's Kadir Putra, Asas Kebangsaan Dalam Perjanjian *Nominee* Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol. 8, No. 2, 2020.
- Ni Putu Tanjung Eka Wijayani, Penyelesaian Sengketa Perjanjian *Nominee* Tentang Peralihan Hak Milik Atas Tanah Kepada Warga Negara Asing (WNA)

Ditinjau Dari Pasal 26 Ayat 2 UUPA, *Jurnal Aktual Justice*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Paulus Snbandi, Kedudukan Hak Pengelolaan Hak Atas Tanah Menurut Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, *Jurnal Yure Humano*, Vol. 2, No. 2. 2018.

Reynaldi A. Dilapanga, Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti Otentik Menurut Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 6, No. 5, 2017.

Urip Santoso, Eksistensi Pengelolaan Dalam Hukum Tanah Nasional, *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 2, 2012.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1994 tentang Visa, Izin, Masuk, dan Izin Keimigrasian.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pelimpahan Kewenangan Pemberian dan Pembatalan Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan